



## Siap Menegur

**KEPALA** Disdikpora Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori menegaskan, pihaknya bakal menegur sekolah yang terindikasi melakukan praktik pengadaaan seragam, selaras dengan ketentuan dalam PP No 17 Tahun 2010. ORI Perwakilan DIY mencatat, tiga sekolah di bawah kewenangan Disdikpora Kota Yogyakarta turut serta dilaporkan mengenai praktik itu.

"Kita tegur sekolah yang pasti, dan memperingatkan. Kalau itu betul-betul terjadi dan orang tua memang keberatan, ya, silakan saja dikembalikan, nanti uangnya kami akan minta untuk dikembalikan," jelasnya, Kamis (7/7/22).

● ke halaman 11

### Siap Menegur

● Sambungan Hal 1

"Jadi, kalau memang ada keberatan dari orang tua, tapi itu sudah telanjur, tidak masalah orang tua tidak jadi membeli di situ. Kami akan koordinasikan dengan sekolah, supaya kejadian begitu jangan diulangi," tambah Budi.

Ia pun mengaku tak habis pikir mengapa fenomena itu bisa terjadi, mengingat Disdikpora Kota Yogyakarta tidak henti-henti melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pendidikan mengenai manajemen sekolah. Termasuk soal ketentuan seragam dan buku ajar, agar disesuaikan dengan PP No 17 Tahun 2010.

"Kami sebenarnya sudah mengundang seluruh sekolah, untuk jangan sampai ada hal seperti itu. Semuanya sudah kami undang dan diberitahu. Yang jelas, sosialisasi sudah sejak lama dan manajemen terus kami perbaiki, sesuai dengan kebutuhan yang ada," urai Budi.

Lebih lanjut, karena fenomena tersebut muncul di hampir seluruh kabupaten dan kota di DIY, ia pun akan menempuh koordinasi lintas pemerintah daerah. Termasuk juga dengan Pemda DIY dan Kanwil Kemenag DIY, lantaran di laporan ORI DIY tercantum sekolah-sekolah jenjang SMA, SMK, serta madrasah.

"Karena di lapangan memang banyak yang harus dikelola, kami berharap sekolah menyesuaikan PP itu. Terus, ini kan tersebar di berbagai daerah, nanti kita koordinasi dengan daerah lain, agar tidak terulang lagi," tegasnya.

### Sieman tegas

Sekretaris Dinas Pendidikan Sieman, Sri Adi Marsanto tidak menampik dugaan adanya sekolah yang menjual seragam. Menurut dia, jajarannya pada Rabu (6/7), sudah menindaklanjuti dengan mengumpulkan 54 kepala SMP di Sieman. Dalam pertemuan itu, semua kepala sekolah hadir.

"Intinya, itu sudah dihentikan, tidak jadi. Sudah jelas, saya jaminannya. Bahwa memang, itu tidak boleh sehingga dihentikan. Dikembalikan saja, kan itu baru tahap mengumpulkan uang," jelasnya, Kamis (7/7).

Menurut Adi, seragam sekolah SMP (putih-biru) aturan pembelannya diserahkan ke orang tua masing-masing, tidak boleh dikordinasi sekolah. Karena itu, terkait 3 SMPN di Sieman yang melakukan penjualan seragam, praktik itu pun telah dihentikan. Pihaknya bahkan sudah membuat surat jawaban atau klarifikasi kepada ORI DIY dengan notulensi dan presensi kepala sekolah.

Dia menyatakan, tiga SMPN di Bumi Sembada yang sempat melakukan praktik penjualan seragam itu, diduga atas inisiasi oleh sebagian orang tua atau pihak komite. Bukan inisiatif dari pihak sekolah. Walaupun demikian, hal tersebut tetap tidak diperbolehkan. "Kalau inisiatif dari pihak sekolah atau kepala sekolah saya rasa tidak. Tapi lebih ke sebagian orang tua tidak ingin ribet, atau komite yang mengadakan. Dan itu memang terjadi," terang Adi.

### Bantu membantah

Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko mengata-

kan, bahwa sesuai ketentuan, pengadaan seragam diserahkan pada kebijakan orang tua masing-masing dan tidak ada campur tangan sekolah. Dirinya pun sudah melakukan pemantauan, dan memastikan tidak ada sekolah di Bantul yang langsung menangani atau mengelola seragam sekolah. "Kalau ada laporan LSM terkait sekolah melakukan penjualan seragam, itu tidak ada, saya katakan tidak betul," tegasnya saat dihubungi, Kamis (7/7).

Isdarmoko menyatakan bahwa yang menangani seragam biasanya orang tua. Terkadang para orang tua saling berkoordinasi untuk pengadaan seragam agar para murid dapat menggunakan pakaian yang sama. Namun koordinasi tersebut tidak ada kaitannya atau tidak ada sangkut pautnya dengan sekolah dan murni dari keinginan orang tua siswa.

Sementara itu, Kanwil Kemenag DIY memastikan jajaran madrasah tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengadaan seragam siswa. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DIY, Abd. Suud menyebut, madrasah yang disebut dalam rilis ORI DIY itu juga tidak pernah mewajibkan peserta didik membeli seragam pada satu pihak, lembaga, ataupun entitas.

Dia tidak menampik, kope-rasi di madrasah, memang menyediakan seragam atau bahannya untuk membantu dan memudahkan orang tua. "Namun, sekali lagi, ya, kami pastikan orang tua tidak wajib membeli di kope-rasi sekolah," tegas Suud. (aka/nf/nto/ard)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005